

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bird, Richard M., Joosung Jun, 2005, *Earmarking in Theory and Korean Practice*, University of Toronto, Toronto.

Brotodihardjo, Santoso. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.

Cleary, Mc, William A, 1989, *Earmarking Government Revenues: Does It Work?*, The World Bank, Washington D.C.

Judisseno, Rimsky K, 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Masyhur, M. Zainuddu, 2008, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 2008, Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.

Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta

Pudyatmoko, Y. Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung.

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suandy, Erly, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta.

Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

## 2. Artikel Jurnal

Kuswijayanti et al, “Krisis-Krisis Socio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi”, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 01, April 2007.

## 3. Hasil Penelitian

Kabupaten Magelang, Badan Lingkungan Hidup, 2013, *Pengkajian Dampak Penambangan Bahan Golongan C di Kawasan Merapi*, Laporan Akhir, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Magelang.

## 4. Makalah

Lutfi, Achmad, “Pemungutan Pajak Daerah Berkonsep Earmarking Tax dan Akuntabilitasnya”, *Konferensi*, IAPA Annual Conference pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jawa Barat, 22-24 Oktober 2013.

## 5. Internet:

Berita Magelang, “Pemkab Magelang Segera Berlakukan Tarif Baru Pajak Pasir, Ini Besarannya”, diakses dari <http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-segera-berlakukan-tarif-baru-pajak-pasir-ini-besarannya> pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 20.00.

Kabar Magelang, “Tolak Kenaikan Pajak Tambang Ratusan Sopir Angkutan Pasir Gruduk Pemda”, diakses dari <http://www.kabarmagelang.com/2019/05/tolak-kenaikan-pajak-tambang-ratusan.html> pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 20.15

Tribun Jogja, “Berpotensi Merusak Air dan Lingkungan, Warga Kecamatan Dukun Tolak Penambangan Pasir”, diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/03/27/berpotensi-merusak-air-dan->

[lingkungan-warga-kecamatan-dukun-tolak-penambangan-pasir](#) pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 13.05 WIB.

Detik News, “Perjalanan Kades Yatin Larang Pertambangan di Lereng Merapi”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4445669/perjalanan-kades-yatin-larang-pertambangan-di-lereng-merapi> pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 15.41 WIB.

## 6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950).

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52).

Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 12).

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 543/45 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/3/KEP/31/2011 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/202/KEP/23/2019 Pemberian Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Desa Ngargomulyo Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan.